

PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DAN PERANAN BADAN SERTIFIKASI HALAL JEPANG DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI HALAL PADA MASA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

Indun Roosiani¹⁾, Erni Puspitasari²⁾

Universitas Darma Persada, Jakarta, Indonesia

Surel Korespondensi: iroosiani@gmail.com, ernipus05@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 17 September 2021, direvisi 30 Oktober 2021, diputuskan 24 November 2021

Abstract

This study aims to analyze the development of the halal industry and the role of Japanese halal certification bodies in improving the halal industry during the reign of Shinzo Abe. The method used is the library method. The results of the study indicate that there are various backgrounds that have led to the development of the halal industry in Japan, giving rise to the Japanese government's efforts to carry out halal certification of various products and other facilities. These various backgrounds include the decline in the population in Japan, so that the level of consumption of the people also decreases, the increase in the world's Muslim population which has great potential as a market share for various Japanese products so that this becomes a target to attract tourists. This is also supported by the increasing Muslim population in Japan. Meanwhile, the role of halal certification in various Japanese products is a requirement that must be met in order to be able to produce and market their products both domestically and for export to various Muslim countries. Halal product certification was widespread during the Shinzo Abe administration.

Keywords: *Economic strategy, halal certification body, muslim tourists*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan industri halal dan peranan badan sertifikasi halal Jepang dalam meningkatkan industri halal pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Metode yang dipergunakan adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai latar belakang yang menyebabkan berkembangnya industri halal di Jepang sehingga memunculkan upaya pemerintah Jepang untuk melakukan sertifikasi halal terhadap berbagai produk dan fasilitas lainnya. Berbagai latar belakang tersebut di antaranya adalah menurunnya jumlah populasi di Jepang, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya juga mengalami penurunan, meningkatnya populasi Muslim dunia yang sangat potensial sebagai pangsa pasar berbagai produk Jepang sehingga hal ini menjadi target untuk menarik wisatawan. Hal ini juga didukung oleh semakin meningkatnya populasi muslim di Jepang. Sementara itu peranan sertifikasi halal dalam berbagai produk Jepang merupakan syarat yang harus dipenuhi agar dapat memproduksi dan memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun untuk ekspor ke berbagai negara muslim. Sertifikasi produk halal marak dilakukan pada saat pemerintahan Shinzo Abe.

Kata kunci: Badan Sertifikasi Halal, strategi ekonomi, wisatawan muslim

PENDAHULUAN

Islam mulai berkembang di Jepang seiring dengan era Restorasi Meiji. Pertumbuhan penduduk Muslim tidak terlepas dari transmigrasi orang Turki, Turkmenist, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakstan. Pada tahun 1980-an, tenaga kerja asing datang dari negara-negara Muslim seperti Bangladesh, Iran, Indonesia dan Malaysia, dan mahasiswa dari negara-negara tersebut juga berdatangan. Berbagai latar belakang pemeluk Islam dari negara lain yang masuk ke Jepang, baik untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan maupun pariwisata, membuat mereka semakin membaaur dengan masyarakat

Jepang. Beberapa dari mereka ada yang menikah dengan wanita Jepang sehingga memiliki hak tinggal permanen dan menjadi warga negara Jepang. Tentu saja kehadiran mereka yang terus meningkat membawa implikasi secara ekonomi bagi Jepang, terutama dalam penyediaan produk halal dan sertifikasi halal terhadap semua produk makanan atau fasilitas lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian besar bagi pemerintahan Jepang, terutama dalam upayanya untuk menarik wisatawan Jepang yang akan berkunjung ke Jepang.

Salah satu fakta yang paling menarik tentang situasi Jepang adalah strategi atau upaya pemerintah Jepang dalam mengembangkan industri halal, meskipun populasi Muslim di Jepang relatif sedikit. Jepang merupakan negara yang berpenduduk muslim paling sedikit dibandingkan tiga negara Asia Timur lainnya. Pada tahun 2010, penduduk Muslim Jepang hanya mencapai 126.836 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Muslim di Jepang hanya 0,1%, jika dibandingkan dengan Cina yang persentase penduduk Muslimnya 4,02%, dan Korea Selatan dengan persentase penduduk Muslimnya 0,5% (Kettani, 2010, dalam Konety et.all,2021). Sebagai negara minoritas Muslim, Jepang mengalami pertumbuhan populasi Muslim selama ekonomi gelembung. Berdasarkan data tahun 2016, ada sekitar 120.000 Muslim di luar negeri dan 10.000 Muslim Jepang yang tinggal di Jepang dan berbasis di tiga wilayah metropolitan besar (Tokyo, Chukyo dan Kinki), jaringan Muslim tidak pernah berhenti tumbuh di seluruh Jepang (Tanada, 2017 dalam Konety et.all, 2021).

Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO), hampir 271.000 orang Indonesia melakukan perjalanan ke Jepang pada tahun 2016, naik dari hanya 63.000 orang pada tahun 2009. Dengan cara yang sama, lebih dari 394.000 orang Malaysia tiba pada tahun 2017, naik dari 89.000 orang dari 7 tahun sebelumnya. Peningkatan dramatis dalam kedatangan wisatawan Asia Tenggara sebagian disebabkan oleh pelonggaran persyaratan visa pemerintah Jepang, pertumbuhan maskapai penerbangan murah yang melayani Jepang, dan peningkatan kelas menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi (Sulong et all, 2020).

Pemerintah khususnya pada masa Shinzo Abe sangat mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri halal. Pemerintah Jepang dan sektor swasta mencari peluang di tengah keterbatasan negara mereka, mengarahkan target ke timur untuk mendapatkan pangsa pasar industri halal. Untuk itu, sektor swasta selalu berupaya memahami dan mengakomodir kebutuhan dan kenyamanan wisatawan muslim selama berada di Jepang. Dengan cara ini Jepang dapat menjadi tujuan wisata yang ramah muslim, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Jepang sebagai tujuan akhir dari pilihan rasional dalam mengembangkan industri halal. Dengan kata lain, Jepang menganggap pariwisata sebagai alat penting untuk menarik wisatawan asing datang ke Jepang dan mendongkrak perekonomian. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan industri halal dan peranan badan sertifikasi halal Jepang dalam meningkatkan industri halal pada masa Pemerintahan Shinzo Abe.

KAJIAN TEORI

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1822) dalam Yakin (2017) menyatakan bahwa: *Tell me what you eat and I will tell you what you are*, ini menunjukkan bahwa makanan yang anda makan akan menentukan identitas nasional. Ketika anda mendengar kata *pizza*, maka anda akan langsung berpikir tentang Italia. Begitu pula bila kita mendengar kata *sushi*, *sashimi* atau *wagyu* maka kita akan berpikir tentang Jepang. Makanan dan identitas saling terkait. Makanan menjadi identitas suatu negara. Makanan memainkan peran penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Dalam makanan kita menemukan kesamaan, seperti kesetaraan, solidaritas dan kemanusiaan. Filosofi hidup dalam makanan dapat menyampaikan pesan kepada orang lain tentang kepercayaan atau agama yang dianut, sehingga ada beberapa motif yang melatarbelakangi suatu masyarakat menghindari makanan tertentu karena alasan

kesehatan, kebutuhan sosial, urgensi budaya hingga norma dan ajaran agama. Maka hal inilah yang menyangkut mata rantai diperlukannya makanan halal. Hofstede (2001) dalam Yusof dan Shutto (2012) menyatakan bahwa konsep halal tidak hanya berlaku untuk produk dan proses, tetapi juga di seluruh rantai nilai perusahaan. Hal ini akan membutuhkan perombakan besar-besaran bagi perusahaan untuk mengkoordinasi, menstandarisasi dan mengendalikan rantai nilainya. Sebaliknya, negara-negara dengan budaya penghindaran kepastian tinggi seperti Jepang cenderung menghindari risiko dan ambiguitas dan lebih memilih inovasi tambahan, di mana setiap langkah kecil dan ambiguitas lebih mudah dikendalikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Industri Halal di Jepang

Munculnya industri halal di Jepang terkait dengan faktor ekonomi dan politik. Dari sudut pandang umat Islam, mereka hanya makan makanan halal karena keyakinan mereka yang mengajari mereka untuk melakukannya. Namun di sisi lain, dari sudut pandang orang Jepang, dapat dikatakan bahwa ketertarikan mereka bukan pada sisi Muslim dan halal itu sendiri; Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada peluang bisnis yang dapat diciptakan dari halal dan Muslim yang datang ke negara tersebut (Komura, 2015, h. 86, dalam Adidaya, 2016).

Dalam hal demografi, Jepang menghadapi angka kelahiran yang rendah dan umur panjang yang terus meningkat, sehingga menyebabkan perubahan dalam permintaan domestik selama beberapa dekade terakhir. Untuk mengatasi masalah ini, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, telah menerapkan apa yang disebut sebagai kebijakan Abenomics yang memberikan harapan baru bagi banyak orang untuk masa depan Jepang yang lebih baik. Hal ini membuat pemerintah mencari cara baru untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan membidik pasar Muslim di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara kini dianggap sebagai pasar berikutnya yang menjanjikan bagi industri pariwisata Jepang.

Halal mengacu pada makanan atau kosmetik yang diproduksi tanpa menggunakan daging babi, alkohol atau sejenisnya yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam seluruh proses bahan makanan seperti jalur produksi, penyimpanan, transportasi, penataan dan penjualan harus dipisahkan secara fisik antara halal dan non halal. Industri halal di Jepang sudah merambah ke berbagai segmen pasar, mulai dari Bandara Internasional Narita hingga ke berbagai universitas di Jepang. Namun, hingga saat ini jumlah perusahaan Jepang yang terkait dengan halal sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Kewpie, Ajinomoto, Taisho Pharmaceutical, POKKA dan Kao menduduki peringkat utama dalam produk halal. Seiring dengan peningkatan industri halal, kepedulian usaha kecil dan menengah di Jepang terhadap masalah halal terus meningkat. Seperti perusahaan Hikari Miso yang mengembangkan pasta kacang tanpa menggunakan alkohol, Global Field yang membidik ekspor ayam kampung “Aomori Syamorock” serta Nishio dan Shiono Koryo yang mengembangkan usaha penggilingan tepung (Mori, h.3).

2. Peranan Badan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Industri Halal di Jepang.

2.1. Gambaran Sertifikasi Halal di Jepang

Masalah sertifikasi halal tidak dapat dilewati dalam bisnis dengan negara-negara Islam. Tidak hanya terbatas pada industri manufaktur tetapi meliputi perusahaan logistik yang berperan dalam seluruh rantai pasokan hasil produksi. Namun, karena Jepang bukanlah negara mayoritas Muslim maka pemerintah Jepang tidak dapat mengatur atau campur tangan dalam masalah agama karena hal ini

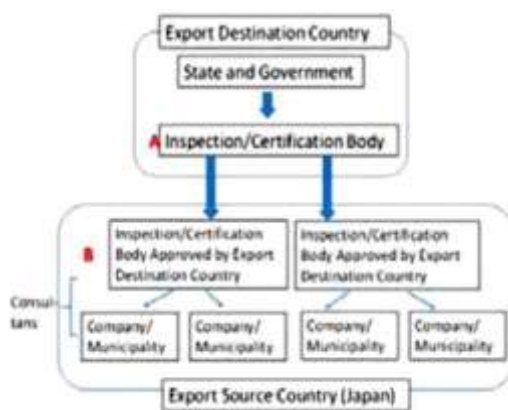
bertentangan dengan pasal 20 Konstitusi Jepang tahun 1974, sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemerolehan sertifikasi halal. Setiap negara memiliki sistem sertifikasi halal. Logo halal dapat dipergunakan setelah mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi halal memiliki kemiripan dengan sistem sertifikasi ISO. Dibandingkan dengan sistem JAS (Japanese Agriculture Standard) atau JIS (Japanese Industrial Standards) yang lebih menitikberatkan pada penjaminan produk, ISO lebih menekankan pada proses produksi. Dalam ketentuan halal, proses produksi memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya dalam ketentuan produk, ISO juga mengambil peranan dalam hal pelayanan dan management.

Tabel 1: The main rules to be accepted as Halal

Source: Masayuki Yamauchi, Reiko Okawa, "Islam basic exercise book" Yamato Shobo (2013) dalam (Mori, The present condition and the subject of Halal in Japan, In comparison with Malaysia

	<ul style="list-style-type: none">- Materials including feed must be only in Halal.- The derivative of pork cannot be used. Lard→Emulsifier seasonings (dairy products, a milk beverage, etc.)Pig hide→ Gelatin (jelly, yogurt, etc.), Collagen(a supplement, cosmetics, etc.) Internal Organ→Enzyme (use in the food manufacturing process, Medical Supplies, etc.)
Processing	<ul style="list-style-type: none">- The Muslim who are attested perform meat production.
Transportation	<ul style="list-style-type: none">- Use car exclusive for Halal Food (contamination with non-Halal food is impossible).
Cooking	<ul style="list-style-type: none">- Use Halal kitchen, exclusive use for Halal food only Alcoholic disinfection of cookware etc. is not allowed.
Sale	<ul style="list-style-type: none">- Isolate from non-Halal food and sell.- Distinguish a cart from non-Halal food.

Gambar 1, memperlihatkan dua cara utama untuk mendapatkan sertifikasi halal di Jepang. Salah satunya dengan mengajukan permohonan langsung ke lembaga inspeksi/sertifikasi yang disetujui oleh negara tujuan ekspor. Sedangkan cara kedua adalah dengan mengajukan atau memperoleh sertifikasi dari lembaga di Jepang yang telah diberikan kewenangan oleh lembaga sertifikasi di masing-masing negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, isu sertifikasi halal menjadi salah satu tantangan besar bagi Jepang untuk menembus pasar Muslim.



Gambar 1. Proses Sertifikasi Halal di Jepang

Sumber: (Yamaguchi, 2019), dalam Konety,et.al (2021)

Perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal yang sah harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga sertifikasi dan memperbaharui sertifikasinya setiap tahun. Tantangan juga terjadi ketika alur proses seperti pada gambar 1 telah dilalui, dimana pada kenyataannya produk yang telah disertifikasi oleh pihak asing tidak selalu diterima di negara lain sebagai produk yang lulus sertifikasi halal. Oleh karena itu, pabrik dan pabrikan Jepang harus memperoleh beberapa sertifikasi sesuai dengan persyaratan masing-masing negara tujuan ekspor.

Table 3
 Halal Certification Authority Bodies in Japan

Country / Region Body	Malaysia – JAKIM	Indonesia - MUI			UAE – ESMA
Japanese Certifying Body (Abbreviation)		Slaughter	Food Processing	Flavoring	
Japanese Muslim Association (JMA)	✓		✓	✓	
Japan Halal Association (JHA)	✓				✓
Japan Halal Unit Association (JHUA)	✓				
Japan Islamic Trust (JIT)	✓				✓
Muslim Professional Japan Association (MPJA)	✓	✓	✓		
Nippon Asia Halal Association (NAHA)	✓				
Emirates Halal Center (EHC)					✓

Sumber: (Yamaguchi, 2019) dalam Konety (2021)

Saat ini, ada beberapa badan otoritas sertifikasi halal di Jepang seperti yang tercantum dalam tabel 3. Mereka mengawasi sertifikasi barang-barang tertentu, seperti penyembelihan makanan pengolahan dan bumbu, dengan izin dari lembaga otoritas halal asing, termasuk Jakim (Malaysia),

MUI (Indonesia), dan ESMA (UEA). Ini semua dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah Jepang serius dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar halal sehingga dapat menciptakan kepercayaan bagi pasar Muslim. Industri halal yang sedang berkembang di Jepang memprakarsai pembentukan organisasi nirlaba, Japan Halal Association (JHA), yang berperan mengawasi sertifikasi halal gerai makanan dan barang, juga melakukan pendekatan untuk fasilitas sholat. JHA adalah lembaga yang memenuhi syarat dan diakui dari International Halal Alliance (IHI) dan anggota berlisensi dari JAKIM. JHA menggunakan standar JAKIM Malaysia untuk membantu produsen atau gerai makanan mendapatkan sertifikasi halal di Jepang. Selain itu, JHA melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk manajer Halal di perusahaan Jepang (Japan Halal Association, 2012). Alhasil, beberapa perusahaan wisata Jepang pun terdorong untuk memperkenalkan paket wisata halal bagi wisatawan muslim yang berbasis di Tokyo dan Osaka.

Organisasi sertifikat halal yang aktif di Jepang sulit disatukan untuk membentuk satu badan sertifikat halal karena beberapa alasan. Yakin (2017) menyebutkan ada tiga kendala yang terjadi di Jepang dalam hal sertifikasi halal. Kendala pertama, antara organisasi halal yang aktif terdapat pembagian etnis antara Jepang dan non Jepang. Organisasi halal yang dipimpin oleh orang Jepang “pribumi” berpikir bahwa masalah Islam di Jepang harus ditentukan dengan hati-hati dan hanya akan menjadi tanggung jawab orang Jepang sendiri dan tidak diatur dan dikelola oleh orang non-Jepang (warga negara atau penduduk tetap dari berbagai etnis dan budaya). negara), seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, atau Malaysia. Untuk non-Jepang, mereka merasa itu adalah bagian dari kewajiban Muslim untuk mengontrol makanan halal dan mengeluarkan sertifikat halal. Kewajiban umat Islam ini merupakan tugas utama dalam dakwah (prolezytation) untuk menyebarkan Islam di Jepang. Ini karena Jepang sebagai negara non-Muslim tidak memiliki otoritas tunggal, seperti di negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir, atau Arab Saudi. Kendala kedua, adalah penafsiran tentang Islam di antara mereka yang berorganisasi halal berbeda-beda. Beberapa asosiasi halal berpendapat bahwa model Islam yang harus diwakili di Jepang adalah Islam moderat. Kelompok ini membela apa yang disebut sebagai “Islam Jepang” yang merupakan perpaduan dari esensi ajaran Islam dengan budaya dan tradisi Jepang. Ada juga asosiasi halal yang diduga membela “Islam ketat” menginterpretasi Islam terlalu literal dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya bangsa, seperti Pakistan, Bangladesh atau Arab. Kendala ketiga, adalah standar masing-masing organisasi kehalalan berbeda-beda, dengan sikap dan orientasi yang berbeda terhadap kehalalan itu sendiri. Satu kelompok berbasis dakwah percaya bahwa dakwah Islam dan pengabdian masyarakat harus menempati urutan pertama. Sedangkan yang lainnya adalah organisasi berbasis bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Satu kelompok memiliki standar “ketat” dan “berat” untuk mengeluarkan sertifikat halal dan kelompok lainnya memiliki standar “lunak” dan “dapat dinegosiasikan” mengenai standar halal.

2.2.Badan Sertifikasi Halal di Jepang

2.2.1 Halal Japan Corporation (HJC)

Halal Japan Corporation (HJC) merupakan perusahaan yang berfungsi sebagai lembaga yang mendukung dan bekerjasama di bidang halal secara umum, termasuk sertifikasi halal oleh JAKIM, Malaysia. HJC juga membantu perusahaan dari perolehan sertifikasi halal hingga pengelolaan dan pemeliharaan. Selain itu, HJC juga menyediakan layanan satu atap untuk semua yang ingin memperoleh Halal Global, mulai dari pemeriksaan spesimen, audit fasilitas, pengaturan pemeriksaan JAKIM, persiapan dokumen, penerjemahan hingga layanan penghubung JAKIM. Dengan dukungan Operasional Komite Halal setiap perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi akan mendapatkan pelatihan penanggung jawab halal dan administrator.

HJC bermitra dengan dengan lembaga halal JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam) karena Malaysia berpenduduk lebih dari 60% muslim. Malaysia juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang menetapkan standar halal dan dikelola secara ketat. Selain itu Malaysia juga menjadi anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sejak awal berdirinya, sehingga Malaysia juga menjalin kerjasama dengan 56 negara muslim. Saat ini, JAKIM menjadi satu-satunya lembaga pemerintah di dunia yang melakukan sertifikasi halal secara ketat, maka JAKIM diterima di sebagian besar negara Islam. Dengan logo sertifikasi JAKIM (gambar 2) pada produk, maka distribusinya tersedia di negara- negara tersebut.



Gambar 2: Logo JAKIM

Sumber: Advantage of HJC: Japan Halal Corporation

Selain layanan sertifikasi Halal Global dari JAKIM, HJC juga menyediakan layanan permohonan sertifikasi ramah Muslim HJC dan halal non alkohol dan non babi dengan standar HJC. Berikut ini logo sertifikasi Halal Global dari JAKIM, sertifikasi ramah muslim dan sertifikasi halal non alkohol dan non babi. Sertifikasi Halal Global terutama menargetkan distribusi produk ke seluruh dunia di bawah sertifikasi JAKIM. Sertifikasi ramah Muslim terutama ditujukan untuk fasilitas akomodasi dan restoran, sedangkan sertifikasi non alkohol dan non babi ditujukan untuk produk distribusi makanan dan minuman.

Gambar 3: Sertifikasi Halal Global Sumber: Certification Service of HJC: Japan Halal Corporation	Gambar 4: Sertifikasi Ramah Muslim Sumber: Certification Service of HJC: Japan Halal Corporation	Gambar 5 : Sertifikasi Non Alkohol dan Non Babi Sumber: Certification Service of HJC: Japan Halal Corporation

2.2.2. Muslim Profesional Japan Association (MPJA)

Muslim Profesional Japan Association (MPJA) merupakan salah satu lembaga sertifikasi halal terkemuka di Jepang. Sejak didirikan tahun 2013, MPJA telah berkomitmen untuk membantu konsumen halal melalui penerbitan sertifikasi halal dan advokasi penyebaran halal di Jepang. Salah satu layanan utama MPJA adalah memberikan sertifikasi halal kepada industri lokal.



Gambar 6: Logo MPJA

Sumber: Muslim Professional Japan Association

MPJA memiliki misi menyebarkan kesadaran dan pengetahuan tentang komunitas Muslim kepada masyarakat Jepang, memberikan sertifikasi halal yang sah dan akurat berdasarkan standar internasional dan menjembatani Jepang dan dunia Muslim dengan menciptakan hubungan kebutuhan produsen dan konsumen dalam layanan halal. Selain itu MPJA juga mendukung terciptanya pasar perdagangan yang bersahabat di berbagai bidang antara Muslim dan Jepang, baik di tingkat lokal maupun global.

Untuk menunjukkan komitmen dalam menyebarkan halal, MPJA telah disertifikasi dan diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2015, Jabatan Agama dan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sejak tahun 2016 dan Kantor Komite Islam Thailand (CICOT) sejak tahun 2018. Sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui, MPJA telah mempromosikan dan menerapkan standar halal yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di dalam dan luar negeri. MPJA juga menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC) sejak tahun 2015. WHFC mewakili 46 lembaga sertifikasi halal termasuk dari Asia, Australia, Selandia Baru, Amerika dan Eropa dengan total formasi 26 negara (MPJA Mutual-Recognition: Muslim Japan Association).

MPJA memegang level tertinggi di industri dalam hal standar sertifikasi halal, karena mempertahankan hubungan internasional dengan badan sertifikasi halal utama di industri. Dengan demikian, MPJA dapat mengeluarkan tanda sertifikasi yang sangat efektif di banyak bagian dunia Muslim. Saat ini, MPJA secara resmi disetujui (saling diakui) oleh tiga lembaga sertifikasi halal luar negeri, yaitu, Badan Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Sentral Islam Thailand (CICOT).

SIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa alasan yang mendasari Jepang untuk mengembangkan industri halal, di antaranya adalah adanya faktor politik dan ekonomi, yang dikaitkan dengan alasan globalisasi di antaranya adalah jatuhnya nilai yen Jepang, perubahan demografi dan hubungan bilateral Jepang dengan negara lain. Turunnya populasi Jepang yang diikuti dengan semakin banyaknya penduduk usia tua menyebabkan turunnya tingkat konsumsi masyarakatnya, Penurunan tingkat konsumsi masyarakat Jepang menyebabkan pendapatan nasional pun mengalami penurunan. Sementara itu, terjadinya perubahan demografi Jepang dengan banyaknya pendatang Muslim menjadi alasan pemerintah Jepang untuk mengubah strategi ekonominya dengan menyediakan berbagai fasilitas yang terkait dengan kehalalan produk makanan. Oleh karena itu Shinzo Abe melakukan berbagai strategi politik guna pencapaian ekonomi stabil dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, terutama dalam membidik wisatawan mancanegara untuk datang ke Jepang dengan menawarkan wisata halal Muslim. Peranan badan sertifikasi halal sangat penting bagi Jepang karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap halal atau tidaknya sebuah produk bila akan dikonsumsi atau diekspor ke negara muslim. Pentingnya badan sertifikasi halal melahirkan berbagai badan sertifikasi di Jepang, antara lain Muslim Profesional Japan Association (MPJA) dan Japan Halal Corporation.

REFERENSI

Adidaya, Achmad Yoza. (2016). *Halal in Japan: History, Issues and Problems: The Effect of The "Halal Boom" Phenomenon on Japanese Society and Industry*. Departement of Culture Studies and Oriental Languages.

Fujiwara Tatsuya, Risyawati. (2017). *Issues of Japan Halal Industry: An Exploration of Potential Obstacles to Japanese SME's Export Development*. Int.J Sup.Chain.Mgt, Vol.6,No.2 June 2017

Halal Japan Corporation. <https://www.jp-halal.com/english-top> International Recognition of Halal Certification Body. https://mpja.jp/en/international_recognition/

Konety et.al. (2021). *Japan's Rational Choice in Developing the Halal Industry*. Mimbar, Vol.37, No.1st (June,2021), pp.00-00

Mori Takayuki. *The Present Condition and Subject of Halal in Japan, In Comparison with Malaysia*. Faculty of Commerce, University of Marketing and Distribution Sciences

Sulong, Husain, ed. all., ed (2020). *Halal Food Facilities in Japan from The Perspective of Malaysian Muslim Tourists*. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences. Vol.10, No.11 Pg.180-192

Yusof Md Shazlinda, Shutto Noriyuki. (2012). *The Development of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study*. Procedia: Social and Behavioral Sciences 121 (2014) 253-261

Yakin Utiriza Ayang. (2017). *Halal Food, Identity, and Authority in Japan*. <https://www.researchgate.net/publication/317230854>